

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan Tim Promotor	iii
Halaman Pengesahan Tim Penilai.....	iv
Halaman Pengesahan tim Penguji.....	v
Halaman Pernyataan Keaslian	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik dan Gambar	x
Daftar Lampiran.....	xi
Motto	xii
Abstrak	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	HAL
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Review Literatur	8
1.5	Kerangka Teori	18
1.5.1	Makna Governance	18
1.5.2	Border Governance dan Cross Border Governance	21
1.5.3	Integrated Border Governance dalam perspektif Jailly	27
1.5.4	Nasionalisme Etnik	35
1.6	Metode Penelitian	40
1.7	Sistematika Penulisan	44
1.8	Lokasi Penelitian	48
BAB II	SATU SUKU: SEJARAH ETNIK ATOIN METO	49
2.1	Suku Atoin Meto dan Persebarannya	50
2.2	Kayu Cendana Yang Tak Lagi Harum	52
2.3	Mereka Yang Berjalan Dalam Kegelapan	54
2.4	Identitas Adat Atoin Meto	56
2.5	Kekayaan Kultural Yang Masih Bertahan	59
2.5.1	Tradisi Oko Mama	59

	2.5.2	Kepercayaan Atoin Meto	60
	2.5.3	Tradisi Fuah Pah	65
	2.5.4	Tradisi Hamis Batar dan Hatama Manaik	66
	2.5.5	Tradisi Tatama Maus	67
	2.5.6	Citra Rumah Adat	68
	2.5.7	Tradisi Belis	68
	2.5.8	Hukum Adat dan Lembaga Adat	69
2.6		Kearifan Lokal Atoin Meto	74
	2.6.1	Mamar, Bagaimana Atoin Meto Mengelola Sumber Daya Alam	80
	2.6.2	Aibun, Tempat Keramat/Zona Larangan	81
	2.6.3	Pengaturan Lahan Pengembalaan/Pemeliharaan Ternak	82
2.7		Kepercayaan Akan Yang Kudus	83
2.8		Dinamika Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor Leste	87
	2.8.1	Era Kerajaan	87
	2.8.2	Era Kolonial	90
	2.8.3	Era Integrasi	96
	2.8.4	Era Pasca Referendum	98
BAB III		TATA KELOLA PERBATASAN (BORDER GOVERNANCE) DALAM LOGIKA NEGARA	104
	3.1	Cara Pandang Negara Terhadap Perbatasan	104
	3.2	Aktor-Aktor Yang Terlibat dalam Pengelolaan Perbatasan	106
	3.3	Kebijakan dan Program Pengelolaan Perbatasan Negara	108
	3.3.1	Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah	109
	3.3.2	Kebijakan Pengelolaan Lintas Batas	113
	3.4	Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan	123
	3.5	Kerjasama Indonesia-Timor Leste	126
	3.5.1	Bidang Kebudayaan	127
	3.5.2	Bidang Ekonomi	127
	3.5.3	Bidang Pendidikan	128
	3.5.4	Bidang Militer	128
	3.5.5	Bidang Kehutanan	129
	3.6	Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Tingkat Pusat	130
	3.7	Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Tingkat Daerah	134
BAB IV		LOGIKA PERBATASAN DALAM PANDANGAN SUKU	137
	4.1	Dinamika Perubahan Teritori dan Makna Wilayah Perbatasan Bagi Etnik Atoin Meto	137
	4.2	Dinamika Persoalan Yang Muncul Akibat adanya Garis Perbatasan	145
	4.2.1	Persoalan Tapal Batas	145
	4.2.2	Persoalan Lintas Batas	149

	4.2.3	Persoalan Silsilah Adat	154
	4.2.4	Penyelesaian Konflik Lokal	155
	4.2.5	Persoalan Tanah Ulayat	155
	4.2.6	Persoalan Pengungsi Eks Timor Timur	
4.3		Cara Atoin Meto Menyelesaikan Persoalan di Perbatasan	158
BAB V		MENGGERAKKAN EKONOMI LOKAL, MENSIASATI BATAS NEGARA	161
	5.1	Perdagangan Indonesia-Timor Leste	161
	5.2	Potensi Ekonomi Lokal yang Belum diberdayakan	164
	5.3	Geliat Ekonomi Perbatasan	171
	5.3.1	Pasar Sebagai Medium Interaksi Atoin Meto	171
	5.3.2	Jalan Tikus: Pilihan Rasional Warga	174
	5.4	Saat Rumput Tetangga Lebih Hijau	176
	5.4.1	Mobilitas Etnik Atoin Meto	179
BAB VI		MEMPERTAHANKAN KESUKUAN DI TENGAH INTERVENSI POLITIK DAN PEMBELAHAN WILAYAH	183
	6.1	Dinamika Politik Identitas Atoin Mato di Perbatasan Indonesia-Timor Leste	183
	6.2	Mobilisasi Etnik Atoin Meto dalam politik Eletoral	186
	6.3	Etno Nasionalisme dan Gagasan Negara Timor Raya	189
BAB VII		MENAWARKAN TATA KELOLA PERBATASAN UNTUK SATU SUKU DUA NEGARA	193
	7.1	Integrasi Pendekatan Kultural dalam Tata Kelola Perbatasan	193
	7.1.1	Memperkuat Peran Rumah Adat dan Ritus Adat Sebagai Arena Komunikasi Etnik	194
	7.1.2	Memperkuat Peran Lembaga Adat dan Lembaga Lokal Lainnya	198
	7.1.3	Mempertahankan Sistem Peradilan Adat	202
	7.1.4	Diplomasi Kultural Dalam Wadah Etnik	207
	7.2	Perkuat Peran Gubernur dalam aspek Dekonsentrasi	212
	7.3	Garda Batas: Peran Etnik Atoin Meto Dalam Pendekatan Keamanan	214
	7.3	Atoin Meto, Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Common Prosperity	217
	7.4	Pelimpahan Wewenang Khusus bagi Pemerintahan Lokal dan Pelibatan Komunitas Atoin Meto dalam Kebijakan Tata Kelola Perbatasan	223
BAB VIII		KESIMPULAN	226